ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION IN CENTRAL JAVA NUMBER 6 YEAR 2013 ABOUT POPULATION CONTROL AND IMPLEMENTING FAMILY PLANNING

(Study Case Of Family Planning Program In Department Of Population And Family Planning And Women’s Empowerment And Child Protection)

Arranged by :

Nisa Nur Aini1,Winarti2, Aris Tri Haryanto3

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

The aim of this research is to describe and analysis about local regulation of central java number 6 year 2013 about population control and implementation policy of family planning program in wonogiri. In case to support this analysis of implementation policy of family planning program , it basically used the theory of model implementation by Van Meter and Van Horn.This research is literally used descriptive qualitative methode. It called purposive sample and snowball technique. Whereas observing, interviewing and documentation is the part of the collection data technique.

And the result of this study is generally, the family planning program in Wonogiri is good. But in the other hand, socialization and counseling are not equally handle by department of counseling field of family program. It cause the limited resources in their region. Citizents are generally had the basic socialization by doctor and nurse.

Keywords: implementation, family planning, socialization.

INTISARI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA

(Studi Kasus Program Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri).

Oleh :

Nisa Nur Aini1, Winarti2, Aris Tri Haryanto3

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Kabupaten Wonogiri. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana (KB), yaitu menggunakan teori model implementasi yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitastif . Teknik penentuan informan penulis menggunakan *Purposive Sample* dan *Snowball*. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini secara umum pelaksanaan Program KB di Kabupaten Wonogiri sudah baik, akan tetapi terkait sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Lapangan KB (PLKB) kepada masyarakat belum seluruhnya tersentuh secara langsung. Dengan alasan terbatasnya sumber daya yang ada di PLKB setiap kecamatan. Masyarakat kebanyakan mendapatkan sosialisasi dari Dokter atau Bidan yang menangani persalinan.

Kata Kunci : Implementasi, Keluarga Berencana, Sosialisasi.

**Pendahuluan**

Tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Menurut data bank dunia, presentase pertumbuhan penduduk di Indonesia berkisar 1,2%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa.BPS juga mencatat, persentase laju pertumbuhan penduduk RI pada tahun 2000-2010 yaitu sebesar 1,49%, naik dibandingkan tahun 1990-2000 yaitu 1,45%. Sejak 2010 hingga 2015, tingkat kelahiran per ibu sebanyak 2,4 anak. Artinya setiap perempuan berpotensi memiliki 2-3 anak. Itu artinya, setiap tahunnya akan terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta setiap tahunnya. (bps.go.id)

Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata akan menyebabkan kesenjangan dalam proses pembangunan secara nasional. Hal tersebut akan menyebabkan permasalahan-permasalahan lain yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan tujuan besar Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan umum.

Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang ideal dengan melaksanakan program pemerintah, yaitu program keluarga berencana yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh BKKBD dan secara hierarkis BKKBN ada di setiap Kabupaten / Kota. Termasuk Kabupaten Wonogiri telah berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah oleh unit pelaksana BKKBN Kabupaten Wonogiri. Dasar peraturan teknis pelaksanaan program KB pada BKKBN Kabupaten Wonogiri mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2016 (berdasarkan sumber data BPS Kab. Wonogiri 2017) sejumlah 1.041.827 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 520.598 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 521.229 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 330.093 KK. Kondisi ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 69 jiwa atau sebesar 0,01% dari 1.041.758 jiwa pada tahun 2015.

Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Rencana Strategis BKBKSPP Tahun 2016-2021, target sasaran kinerja cakupan KB Aktif tahun 2016 sebesar 79,50% dari kondisi awal sebesar 79,38%. Untuk dapat mencapai target tersebut, Dinas PPKB dan P3A memiliki strategi peningkatan kualitas SDM tenaga penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKB dengan kebijakan meningkatkan anggota kelompok kegiatan yang ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Program KB di Kabupaten Wonogiri telah berjalan, akan tetapi ada beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan. Salah satunya mengenai akses, kualitas informasi, pendidikan konseling, dan penggunaan alat kontrasepsi. Menurut survey yang dilakukan di Kabupaten Wonogiri, KB yang dilakukan di Wonogiri sudah ada peningkatan akan tetapi belum efektif. Terutama sosialisasi informasi atau sering disebut penyuluhan program KB belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. (hasil wawancara pada masyarakat tertanggal 12 November 2017). Hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan Kabupaten Wonogiri masih mempercayai budaya lama, “banyak anak banyak rezeki”. Masyarakat awam belum sepenuhnya mengetahui arti penting dari program KB.

Tujuan penelitian mengenai implementasi program keluarga berencana di Kabupaten Wonogiri adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisisprogram Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Kabupaten Wonogiri.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitiankualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Sugiyono (2010 : 3) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan di lapangan. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang biasa disebut Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Fokus obyek penelitian ini adalah pada bidang Keluarga Berencana (KB) pada dinas terkait. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, data primer diperoleh dari informandengancara wawancaradata sekunderberupaarsipdata, maupundokumentasi padaDinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri, terkhusus Bidang Keluarga Berencana.Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang merupakan sumber data primer yang di gunakan untuk menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penentuan informan dari penelitian inimenggunakan teknik sampel, yaitu *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling.* Dalam penelitian ini menggunakan Trianggulasi Metode. Menurut Norman K. Denkin (dalam Lexy, 2009 ) menyampaikan bahwa trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

Dalamprosesnya, analisis data dalampenelitianinimenggunakan model interaktif yang di kembangkanoleh Mathew B. Miles, A. Michael HubermandanSaldana dalam Miles &Huberman (2014 : 12), yaitusebagaiberikut :

**Analisis dan Pembahasan**

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan program KB di Kabupaten Wonogiri ini dianalisis dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan van Horn. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012 : 158) merumuskan abstraksi bahwa yang memperlibatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan, standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaku kebijakan. Adapun variabel yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan –tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

1. Sumber – sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup sumber daya manusia ,dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif, dan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan.

1. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Komunikasi di dalam dan antara organisasi – organisasi merupakan suatu proses yang kompleks. Dalam meneruskan pesanke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber – sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan atau memberikan interpretasi yang bertentangan.

1. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.

Pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubunganbaik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

1. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Indikator yang dinilai dalam faktor ini adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebagai dampak dari implementasi sebuah kebijakan.

1. Kecenderungan Pelaksana

Indikator – indikator pencapaiann ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Hal ini berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan kebijakan secara menyeluruh. Meskipun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk mengidentifikasikan dan mengukur pencapaian.

Adapun dari analisis data yang dilakukan, didapatkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Ukuran-Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dari program KB sudah tersampaikan kepada masyarakat. Masyarakat selaku kelompok sasaran mengakui adanya sosialisasi mengenai program KB, sehingga masyarakat mengetahui tujuan dari program KB. Akan tetapi masyarakat masih ada yang memilih untuk tidak berKB dengan alasan keyakinan agama dan takut efek samping. Meskipun begitu, dari data yang didapatkan, jumlah peserta KB di Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa kesadaran berKB masyarakat mengalami peningkatan.

Dari data yang didapatkan, program KB pria dilakukan dengan kontrasepsi berupa Medis Operasi Pria (MOP) dan Kondom. Sedangkan jenis alat kontrasepsi wanita lebih beragam, antara lain IUD, medis Operasi Wanita (MOW), Implan, Suntik KB, Pil KB. Secara umum program KB di Kabupaten Wonogiri dinyatakan berhasil karena dari target 79,50% dari kondisi awal pencapaian KB Aktif tahun 2015 sebesar 79,38% , pada tahun 2016 pencapaian KB Aktif di Kabupaten Wonogiri mencapai 80,14%.

1. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Wonogiri dinyatakan baik, sebab dalam pelaksanaan program KB telah mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah daerah sampai pada tatanan birokrasi paling bawah, yaitu kelurahan, bahkan sampai pada tingkat RT. Serta sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksana program KB ini mencakup Dokter dan Bidan Desa dan dengan adanya kerjasama dengan UPPKH.

Sumber dana dalam implementasi program KB dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan ABDN Pusat. Fasilitas, sarana dan prasarana berupa jaringan pelayanan KB yang sudah merata di setiap tingkatan wilayah, dimana di tingkat Kabupaten terdapat 1 (satu) Pusat Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Milik Pemerintah Kabupaten, 6 (enam) Klinik KB Swasta (Marga Husada, Air Mancur, dr. Sinung pribadi, PKU Muhammadiyah, Medika Mulya dan Fitri Candra), sebanyak 40 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah. Serta di setiap kecamatan sudah terdapat Balai Penyuluhan KB.

1. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana.

Mengenai sosialisasi atau penyuluhan KB, kenyataan yang berada di lapangan sosialisasi sudah dilakukan kepada masyarakat dengan upaya sosialisasi dilakukan oleh para Bidan Desa. Mengenai penyuluhan langsung kepada masyarakat sudah dilakukan langsung oleh PLKB belum sepenuhnya terlaksana di setiap desa/kelurahan, mengingat keterbatasan sumber daya manusia PLKB di kecamatan masih terbatas. Meskipun begitu, pihak PLKB sendiri mengupayakan adanya sosialisasi dari pihak-pihak lain seperti Bidan Desa dan UPPKH untuk selalu melakukan sosialisasi program KB kepada masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta sudah baik. Terbukti dengan penyedia layanan KB yang semakin dapat dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat pedesaan juga semakin mudah mendapatkan akses layanan KB, karena di Puskesmas dan Bidan-Bidan Desa sudah menyediakan akses untuk berKB dengan fasilitas yang sama.

1. Karakteristik Badan Pelaksana

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan terkait program KB tidak mengalami perubahan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dulunya BKBKSPP, hanya sebuah penyesuaian nomenklatur saja, mengenai struktur organisasi terkhusus pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada perubahan pada tupoksinya akan tetapi orang-orangnya tetap, Renstra yang digunakan masih renstra yang lama, yaitu Renstra 2016-2021.

Mengenai ciri/karakter, para pelaksana memiliki ciri kesopanan, penuh perhatian dan melayani dengan kehati-hatian. Kemudian masyarakat sendiri menilai komunikasi dari para pelaksana ketika melayani masyarakat dengan sopan dan telaten.

1. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Kebijakan program keluarga berencana (KB) belum efektif terkait permasalahan ekonomi atau pembiayaannya. Terbukti adanya perbedaan kemampuan masyarakat yang terkendala dari segi ekonomi, yaitu mengenai biaya berKB. Masyarakat pedesaan lebih mengikuti program pemerintah.

Secara sosial, masyarakat mengharapkan adanya program-program pemerintah mengenai KB. Masyarakat yang memiliki kesadaran berKB secara sosial mengakui jika memiliki anak dengan jumlah lebih dari 2 akan merasa kewalahan dalam merawatnya, sehingga masyarakat KB lebih menekankan kasih sayang pada anak. Masyarakat yang sudah berKB penghasilan dari pekerjaannya akan lebih terorganisir dalam kegiatan ekonomi keluarganya. Secara umum masyarakat elite politik mendukung adanya kebijakan program KB, dengan adanya komunikasi dan pertemuan rutin dari pihak Dinas di kecamatan, yaitu PLKB yang selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat serta pamong dalam lingkup satu kecamatan. Ada pertemuan PKB (Paguyuban Keluarga Berencana), dan menjadwalkan adanya pertemuan PKB RT, PKB Dusun.

1. Kecenderungan Pelaksana.

Kecenderungan pelaksana dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan KB selalu memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat tidak ada keterpaksaan untuk mengikuti program KB, sosialisasi berupa saran dan anjuran berKB demi terjaganya kesehatan ibu dan anak serta ekonomi keluarga yang lebih terorganisir.

**Penutup**

1. Kesimpulan

Secara umum, dilihat dari segi ukuran dan tujuan serta sumber-sumber kebijakan, kebijakan tersebut terukur dan tujuan dari program KB sendiri dapat dipahami oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Akan tetapiterkait sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Lapangan KB (PLKB) kepada masyarakat belum sepenuhnya tersentuh secara langsung. Dengan alasan terbatasnya sumber daya yang ada di PLKB setiap kecamatan.

1. Saran
2. Perlu dilakukan penyuluhan secara menyeluruh.Belum terpenuhinya penyuluhan langsung dari Dinas ke masyarakat tingkat desa/kelurahan. Sebaiknya dilakukan penyuluhan ke desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang belum tersentuh sosialisasi langsung dari PLKB. Sebab selama ini kebanyakan program KB baru disosialisasi dari Bidan yang menangani saat persalinan masyarakat tersebut.
3. Harapan masyarakat terhadap program KB supaya ada Program KB Gratis yang dapat terjamin keberlanjutannya. Karena banyak masyarakat yang menjadi peserta Non MKJP (Metode Kontrasepsi jangka Panjang) karena terkendala masalah pembiayaan.

**Daftar Pustaka**

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta. 2012.

Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Alfabeta. Bandung, 2008.

Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Kebjakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi, dan Kasus.* Lukman Offset dan YPAPI. Yogyakarta. 2003

Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya. Bandung. 2009

Miles, Huberman, Saldana. *Qualitative data analysis a methode sourcebook. Edisi 3*. Sage Publication. Wasington. 2014.

Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis.Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi.* Jakarta: UI-Press. 1992

Ridha Suaib, Muhammad.*Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan.* Calpulis. Yogyakarta. 2016.

Sugiyono, Prof., Dr., *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung. 2016.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik ; Teori, Proses, Dan Studi Kasus.* CAPS. Yogyakarta. 2012.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik ; Teori & Proses.* Media Pressindo. Yogyakarta. 2007.

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perkembangan kependudukan dan Keluarga Berencana.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

**Referensi Jurnal**

Rizal, Muhammad. *“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi KB Pria di Kecamatan Kampar Kiri Hilir)*”. Kalimantan. 2016.

Christiana, et al. *“Increasing the uptake of long-acting and permanent methods of family planning: A qualitative study with village midwives in East Java and Nusa Tenggara Barat Provinces, Indonesia”.* Nusa Tenggara. 2013.

**Sumber Internet :**

bps.go.id diakses pada 9 Oktober 2017

<https://wonogirikab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/281> diakses pada 12 Oktober 2017

<https://www.bagi-in.com/jumlah-penduduk-di-indonesia/> diakses pada 12 Oktober 2017

<https://intansaf.wordpress.com/2013/09/26/permasalahan-kependudukan-di-indonesia/> diakses pada 12 Oktober 2017

<https://id.scribd.com/document/359298144/Kebijakan-Pemerintah-Terkait-Kb> diakses pada 13 Oktober 2017

<https://rerezanky.blogspot.co.id/2016/11/makalah-kebijakan-pemerintah-terhadap.html> diakses pada 14 Oktober 2017